

PEKANBARU, RIAUPLUS.COM- Meski isu rasionalisasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau sudah terdengar, namun Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi menyatakan hingga saat ini pihaknya belum ada melakukan rasionalisasi anggaran.

"Apa yang ada di OPD, tentu mereka mengevaluasi dan memperkirakan. Itu sebatas itu saja, belum ada eksekusi rasionalisasi," kata Ahmad Hijazi, Ahad (5/8/2018).

Menurutnya eksekusi rasionalisasi itu akan dilakukan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan, sedangkan saat ini pihaknya belum ada membahas APBD perubahan.

Bahkan saat ditanya berapa perkiraan anggaran yang kena rasionalisasi, Ahmad Hijazi mengaku kalau pihaknya sudah menyampaikan ke Dewan prokna-prokna atau kemungkinan-kemungkinan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat.

"Dan itu sudah diterima Dewan bahwa kondisi kita saat ini seperti itu (tunda salur). Tapi kalau sekarang belum bicara rasionalisasi karena pendapatan kita juga dinamis, DBH itu dinamis dan dana perimbangan juga dinamis menurut pusat," paparnya.

Karena itu, lanjut Ahmad Hijazi, sebelum melakukan rasionalisasi Pemprov Riau masih menunggu kemungkinan-kemungkinan itu. Sehingga kalau pendapatan bisa memenuhi kebutuhan belanja kenapa harus rasionalisasi.

"Jadi rasionalisasi itu bukan sebab tapi akibat. Kalau lah pendapatan kita tidak ditransfer semua oleh pusat, berarti perlu rasionalisasi. Makanya sekarang kita belum bisa bicara angka rasionalisasi, karena pendapatan masih dinamis sekali,"tuturnya.ck/nor